



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 7 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
  - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya ;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-GU;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang :
- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa;
  - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
  - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik langsung maupun tidak langsung.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28 );
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan  
Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
  2. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara  
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 7 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Drs. Berce Dwi Sasmito	Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	a. 1.04.02.2.02  1) 1.04.02.2.02.03  2) 1.04.02.2.02.04  b. 1.04.02.2.03  1.04.02.2.03.01 c. 1.04.03.2.03  1.04.03.2.03.02 d. 1.04.05.2.01 1.04.05.2.01.02  e. 2.10.05.2.01  2.10.05.2.01.02  f. 2.10.10.2.01  2.10.10.2.01.01	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP  Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator  Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana  Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( sepuluh ) Ha  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian  Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

1	2	3	4	5
2	Sugianto, ST, M.M.Kes	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	a. 1,03.03.2.01  1) 1.03.03.2.01.01 2) 1.03.03.2.01.04 3) 1.03.03.2.01.06 4) 1.03.03.2.01.07 5) 1.03.03.2.01.11  b. 1,03.05.2.01  1) 1.03.05.2.01.03 2) 1.03.05.2.01.10  c. 1.03.07.2.01  1,03.07.2.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimun ( SPAM ) di Daerah Kabupaten/Kota  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Derah Kabupaten/Kota  Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 7 /404.012/B/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Instansi	Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Yunan Adi Nugroho, ST	Analisis Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	a. 1.04.02.2.02 1) 1.04.02.2.02.03 2) 1.04.02.2.02.04 b. 1.04.02.2.03 1.04.02.2.03.01 c. 1.04.03.2.03 1.04.03.2.03.02 d. 1.04.05.2.01 1.04.05.2.01.02 e. 2.10.05.2.01 2.10.05.2.01.02 f. 2.10.10.2.01 2.10.10.2.01.01	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( sepuluh ) Ha Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

1	2	3	4	5
2	Erdina Indri Permanasari, ST, MM	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi	a. 1.03.03.2.01  1) 1.03.03.2.01.01 2) 1.03.03.2.01.04 3) 1.03.03.2.01.06 4) 1.03.03.2.01.07 5) 1.03.03.2.01.11  b. 1.03.05.2.01  1) 1.03.05.2.01.03 2) 1.03.05.2.01.10  c. 1.03.07.2.01  1,03.07.2.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Murni ( SPAM ) di Daerah Kabupaten/Kota  Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO